

Politik dalam evaluasi kebijakan publik, studi kasus: unsur politis pada evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 (permendikbud no.159/2014) yang berimplikasi pada penundaan kurikulum 2013 (permendikbud no.160/2014) = Politics within public policy evaluation case study politics factor on evaluation of policy implementation of curriculum 2013 permendikbud no 159 2014 which implicates on policy implementation postponement of curriculum 2013 permendikbud no 160 2014 / Marsha Javierra

Marsha Javierra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433918&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013. Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.

Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan. Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui artikel berita di media massa.

Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam

proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu sendiri adalah awal masalah

<hr>

ABSTRACT

The background research is the dualism curriculum which currently used in Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office, Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about the postponement of Curriculum 2013 implementation.

Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a field study to collect information. Information obtained from interviews with stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research and Development Agency, and add some supporting information through news articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that evaluation itself is the beginning of the problem